

Hikmah Ramadan

Kesalahan Sosial

Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd

TAHUN ini merupakan Ramadan kali kedua di tengah wabah Covid-19. Seperti tahun sebelumnya, meski tidak sama persis, pandemi mengubah berbagai aktivitas kehidupan kita. Dari bekerja, belajar, belanja, sampai kegiatan sejenis lain tetap dilakukan secara daring atau virtual. Membatasi pertemuan fisik akan menekan potensi penyebaran dan penularan virus Korona yang tidak pandang bulu memilih calon korban.

Di samping itu, secara rohaniah, menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah SWT. Terbatasnya kegiatan di tengah amukan virus Korona tetap tidak boleh menyurutkan motivasi kita dalam melaksanakan ibadah selama Ramadan. Seharusnya semakin khushyuk dan santuk dalam melaksanakan ibadah puasa, salat berjamaah, ibadah tengah malam, memperbanyak doa dan zikir, serta berbagai ibadah sunah lainnya.

Ibadah selalu mempunyai dua cakupan, yakni dimensi personal dan dimensi sosial. Ramadan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kedua dimensi tersebut. Datangnya pandemi Covid-19 memberi kesempatan bagi kita untuk merealisasikan dimensi sosial melalui membantu sesama, terutama menolong pihak yang terdampak virus Korona, anak yatim, dan fakir miskin.

Bank Dunia (2020) mencatat selama pandemi sebanyak 115 juta orang mengalami kemiskinan ekstrem. Masalah ini memerlukan penyelesaian secara bertahap dan kolektif. Karena itu, bulan suci Ramadan merupakan kesempatan besar untuk berderma. Paling tidak meringankan beban mereka yang rentan secara ekonomi. Di sinilah, kesalahan sosial merupakan wujud ketaatan beribadah memberi jalan terbaik mengatasi masalah tersebut.

Kesalahan sosial adalah nilai Islam yang melihat kepedulian seseorang terhadap kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari ibadah.

Islam memandang ketakwaan seseorang tidak cukup ditandai oleh ritual yang bersifat individu seperti salat, puasa, dan haji.



Namun, ketakwaan akan lebih komprehensif (*kaffah*) bila juga mengakomodasi kepentingan umum, bermanfaat kepada lingkungannya. Selain itu, kesalahan sosial juga mengajarkan kita untuk berempati dan bersimpati atas kekurangan yang dirasakan orang lain. Sebagai contoh, menahan lapar dan haus selama berpuasa mendidik kita betapa keadaan itu juga dialami mereka yang kurang beruntung. Merasakan hal serupa sebagaimana dirasakan orang lain mendorong kita agar senantiasa menolong sesama.

Kegiatan sehari-hari sebetulnya sangat akrab dengan kesalahan sosial. Seperti sedekah jariah, baik dilakukan di kantor, dusun, maupun lokasi lainnya, sesungguhnya merupakan contoh riil kesalahan sosial. Memberikan sesuatu kepada orang lain hendaknya dilandasi rasa ikhlas tanpa dibatasi jumlah dan waktu tertentu. Semua itu semata-mata demi mengharap ridla Allah SWT. Manfaat amalan ini akan dirasakan langsung oleh orang lain dan pahalanya terus mengalir meski kita sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak shaleh yang mendoakan kepadanya" (HR Muslim). Hadis ini mengokohkan hati kita untuk melakukan lebih banyak aksi sosial kemasyarakatan selama pandemi.

Pada momentum Ramadan, mempraktikkan kesalahan sosial selama menjalankan ibadah puasa akan tertanam kuat jika masyarakat hadir ke dalam diri kita. Dengan demikian, berpuasa akan terasa lengkap dengan sikap solidaritas sosial terhadap sesama, sehingga ketakwaan kepada Allah SWT berlangsung lebih paripurna. Semoga kesalahan sosial yang berujung kepada kemanfaatan bersama tidak saja berlangsung di masa pandemi, tetapi juga setelahnya tanpa batasan akhir. Aamiin...(*)-f

Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd,
Mantan Rektor UNY. Kini sebagai Dosen Pascasarjana Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.



ASAP PUTIH MERAPI: Pencari rumput melintasi jembatan di atas Kali Boyong, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Kamis (22/4). Kemarin Gunung Merapi teramati mengepul asap putih intensitas tebal serta tercatat adanya guguran berjarak luncur maksimal mencapai 1,6 kilometer.

MOBILITAS MASYARAKAT MENINGKAT

Diterbitkan Adendum SE Peniadaan Mudik

JAKARTA (KR) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeluarkan Adendum Surat Edaran (SE) No 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021 ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku SE Satgas No 13 Tahun 2021.

"Adendum SE ini berlaku efektif mulai Kamis (22/4) sampai 5 Mei dan 18 Mei sampai 24 Mei serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan," kata Doni.

Adendum diterbitkan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, di mana pada bulan Ramadan dan semakin mendekati Idul Fitri Tahun 1442 H terda-

pat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga maupun pariwisata yang bisa meningkatkan risiko laju penularan virus Korona.

Selain itu, berdasarkan hasil Survei Pascapenetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan ditemukan masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik.

"Tujuan adendum SE ini untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan," ujar Doni. Sementara itu, Pemda DIY segera

melakukan koordinasi kembali dengan instansi terkait tentang kesiapan pengetatan perjalanan mudik. Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 memberlakukan aturan baru pengetatan perjalanan mudik yang berlaku dari 22 April hingga 5 Mei dan H+7 peniadaan mudik sejak 18-24 Mei.

Kepala Dinas Perhubungan (DisHub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, perubahan aturan tersebut berdasarkan kondisi masyarakat di Indonesia saat ini. Sebab masyarakat banyak yang mencuri start mudik sebelum aturan larangan mudik diterapkan pada 6-17 Mei 2021.

Made mengungkapkan, bersama kepolisian, Satpol PP maupun DisHub kabupaten/kota se-DIY telah mempersiapkan strategi terkait pelarangan mudik yang diterapkan pada 6-17 Mei. Namun, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan kepolisian, karena penyekatan atau pemberhentian kendaraan itu adalah kewenangan kepolisian dan DisHub sifatnya merupakan tenaga pendukung. (Sim/Ira/Ria)-f

DIDUGA MEMINTA UANG RP 1,5 MILIAR

Oknum Penyidik KPK Masih Diperiksa

JAKARTA (KR) - Oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga meminta uang sekitar Rp 1,5 miliar kepada Walikota Tanjung Balai Sumatera Utara HM Syahril sudah diamankan. Bahkan, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, oknum tersebut sedang menjalani pemeriksaan yang dilakukan KPK.

"Setelah diamankan, tim penyelidik KPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap oknum tersebut di Gedung Merah Putih KPK," jelas Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/4).

Seperti diberitakan, sebelumnya beredar informasi oknum penyidik KPK diduga meminta uang sekitar Rp 1,5 miliar kepada Syahril. Oknum tersebut diduga mengiming-imingi dapat menghentikan kasus yang diduga menjerat Syahril.

Sehubungan hal itu, Ali mengatakan, KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan sejumlah pihak. Selain itu, ia juga memastikan penanganan kasus ini diurus sendiri oleh KPK secara transparan.

"Untuk itu, kami persilakan masyarakat mengawal prosesnya," kata Ali seraya menyebutkan, secara paralel Dewan

Pengawas KPK juga memeriksa atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum penyidik tersebut. "Kami tegas bahwa KPK tidak memberikan toleransi terhadap tindakan koruptif dan pelanggaran kode etik yang dilakukan setiap insan KPK. Perkembangan mengenai ini akan kami informasikan lebih lanjut," tutur Ali.

Seperti diketahui, KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan suap terkait dengan lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019. Dengan adanya proses penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, KPK tengah menyelidiki dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidiknya. "Saat ini, KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana dimaksud dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan lainnya," tuturnya.

(Ful)-f

Belum Jelas Kapan Kabinet Direshuffle

JAKARTA (KR) - Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan mengaku tidak tahu kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan melakukan reshuffle kabinet. Sedangkan DPR telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek.

Hal tersebut diungkapkan Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman kepada Wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/4).

"Pada Selasa lalu saya bertemu presiden. sama sekali tidak ada bicara reshuffle," jelas Fadjroel.

Untuk diketahui kabar akan adanya reshuffle kabinet itu dilontarkan, Ali Mughtar Ngabalin, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).

Wacana reshuffle menguat pascarencana peleburan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi. "Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin.

Lebih lanjut Fadjroel mengatakan hingga saat ini dirinya belum mengetahui kapan reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi. "Mengenai kapan, siapa, dan kemudian berapa banyak yang akan terjadi perubahan, cuma presiden dan Allah SWT yang tahu, jadi harap bersabar," jelasnya.

Mengenai adanya kabar Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh menjelang isu reshuffle, Fadjroel menyatakan pertemuan semacam itu biasanya bersifat internal dan tidak melibatkan jubir, sehingga kebenarannya hanya bisa dikonfirmasi

masi kepada para tokoh yang disebut-sebut bertemu Presiden.

Menurutnya, yang pasti dapat disampaikan saat ini, pemerintah telah mengirim permintaan persetujuan kepada DPR tentang pembentukan Kementerian Investasi dan pengubahan kementerian dalam bentuk penyatuan Kemendikbud dan Kemenristek.

Dia mengatakan yang terpenting presiden sudah menunjukkan kepemimpinan, di mana setiap perubahan yang dilakukan adalah untuk efektivitas dan efisiensi serta adaptasi terhadap perubahan keadaan.

"Karena itu yang terpenting beliau tetap mempertahankan visi Indonesia maju dan visi Indonesia sentris serta target pertumbuhan ekonomi 5 sampai 7 persen," jelasnya. (Sim)-f

Rp 30,6 Triliun untuk THR PNS

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan daerah sebesar Rp 30,6 triliun untuk tahun 2021. Dengan rincian, Rp 14,8 triliun untuk daerah dan Rp 15,8 triliun untuk pusat.

"Kalau dilihat jumlah dari belanja negara kita, jumlah THR kita yang akan dibelanjakan mencapai Rp 30,6 triliun," ujar Menkeu di Jakarta, Kamis (22/4).

Diharapkan, proses pencairan THR tersebut sudah mulai dilakukan H-10 sampai H-5 Hari Raya Idul Fitri 2021. "Jadi apakah akan beri dampak positif pasti, THR ini seperti yang biasa kita sampaikan akan dibayarkan pada H-10 nanti sampai H-5, karena biasanya ini bertahap," jelasnya.

Adapun pemberian THR ini nantinya akan disampaikan lebih lanjut oleh Pemerintah. Mengingat saat ini Peraturan Pemerintah (PP) sedang dalam proses penyelesaian untuk bisa segera ditandatangani bersama. "Jadi nanti akan kita umumkan, PP-nya masih dalam proses dalam paraf bersama untuk selanjutnya ditandatangani Bapak Presiden," katanya.

Sri Mulyani berharap, pemberian THR ini akan mendorong konsumsi di tingkat masyarakat, sekalipun Pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini. "Meskipun masyarakat tidak mudik tapi ini bisa mengirim kepada orangtua atau saudara di tempat lain," ujarnya. (Lmg)-f

Pemda DIY Percepat Vaksinasi

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi, khususnya bagi para lansia karena mereka menjadi salah satu prioritas penerima.

"Kami terus melakukan sejumlah upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi. Jadi begitu DIY mendapatkan droping vaksin dari Pemerintah Pusat akan langsung dipergunakan (dihabiskan). Tentunya lansia menjadi salah satu prioritas sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan dengan adanya percepatan tersebut, masyarakat DIY khususnya lansia bisa segera divaksin," kata Sekda DIY K Baskara Aji, Kamis (22/4).

Baskara Aji menyatakan, selain lansia, guru juga termasuk salah satu prioritas penerima vaksinasi. Terlebih dalam tahun ajaran baru mendatang pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan. Jadi sebelum pembelajaran dilakukan harus dipastikan semua guru sudah mendapatkan vaksin. Dengan begitu saat pembelajaran tatap muka mereka bisa merasa aman dan mampu memberikan layanan yang lebih baik lagi.

"Saat ini baru sekitar 50 persen guru di DIY yang sudah divaksin. Karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka semakin dekat, upaya percepatan vaksinasi terus dilakukan," ungkap Ketua PGRI DIY tersebut.

Menurut Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih, kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY, Kamis, bertambah 257 menjadi 37.846 kasus. Pasien sembuh bertambah 274 menjadi 32.426 kasus, kasus meninggal bertambah 8 menjadi 927. (Ria/Ira)-f



KR-Antara/Okny Lukmansyah

PERLUASAN TRANSAKSI UPK 75: Pegawai melayani penukaran uang baru pecahan Rp 75.000 di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI), Tegal, Jawa Tengah, Kamis (22/4). Untuk memastikan kualitas layak edar dan perluasan penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI (UPK 75) pecahan Rp 75.000 dalam bertransaksi selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 H, masyarakat dapat menukar satu KTP untuk 100 lembar UPK 75 setiap harinya dan dapat diulang pada hari berikutnya.